

Judul : DPR Siapkan Revisi UU Migas
Tanggal : Senin, 07 Desember 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

| RUU ENERGI BARU TERBARUKAN |

DPR SIAPKAN REVISI UU MIGAS

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat memberi sinyal untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi paling cepat pada pertengahan 2021. Revisi dilakukan menyusul pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan.

Denis R. Mellanova
denis.mellanova@bisnis.com

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa parlemen masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan yang ditargetkan bisa disepakati dalam rapat paripurna pada tahun depan.

"Pertengahan masa sidang sudah selesai draf terakhir (RUU EBT), setelah itu UU EBT segera dipari-purnakan dan masuk UU Migas kurang lebih Juli 2021 akan membahas UU Migas," katanya dalam sebuah webinar yang digelar pada Sabtu (5/12).

Sugeng menjelaskan, UU Migas sempat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2018 dan sudah dibawa ke dalam sidang paripurna. Namun, pemerintah melalui Surat Presiden (Surpres) belum menyertakan daftar inventaris masalah (DIM).

Pada 2019, telah memasuki masa jabatan anggota DPR yang baru dengan Prolegnas baru yakni UU Minerba, UU EBT, dan terakhir adalah UU Migas. Pasalnya, Sugeng mengatakan dalam perspektif ketahanan energi nasional, EBT lebih memerlukan perhatian.

"Betul UU Migas sangat penting, tetapi kita melihat kepentingan yang lebih besar dalam konteks energi jadi semuanya menjadi penting," ungkapnya.

Sebelumnya, Sugeng mengatakan bahwa salah satu yang akan dibahas dalam RUU Migas adalah pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus di sektor hulu migas. Pembentukan BUMN khusus sempat mencuat dalam

“ Kita melihat kepentingan yang lebih besar dalam konteks energi jadi semuanya menjadi penting. ”

draft UU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi pada akhirnya dimasukkan dalam draf final.

Sugeng mengatakan, pembentukan BUMN khusus yang menjelaskan kegiatan hulu migas sudah menjadi keharusan yang patut dilaksanakan. "Pasalnya, pembentukan tersebut telah menjadi amanat Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

"Itu nanti masuk di UU Migas, tidak di Cipta Kerja," katanya.

SKK MIGAS

Sementara itu, terkait dengan keberadaan SKK Migas atau kehadiran BUMN Khusus sebagai badan pelaksana kegiatan hulu migas hingga saat ini belum juga selesai. Investor di sektor hulu migas terus menantikan adanya kepastian.

Dalam kaitan itu, Chairman of Regulatory Affairs Committee Indonesia Petroleum Association

Ali Nasir mengatakan bahwa pada dasarnya investor tidak terlalu mempersalahkan bentuk lembaga yang akan menjadi badan pelaksana. Menurutnya, investor telah beberapa kali melakukan kerja sama kegiatan hulu migas dari berbagai bentuk, yaitu mulai dari PT Pertamina (Persero), BP Migas, hingga saat ini menjadi SKK Migas tanpa adanya masalah.

Akan tetapi, investor ingin melihat adanya suatu lembaga yang kuat dan sesuai dengan konstitusi. Ali mengatakan keinginan tersebut agar menghindari adanya kecacuan pada saat adanya gugatan seperti yang terjadi pada BP Migas.

"Fungsi kelembagaan penting bagi investor, tapi bukan yang terpenting," katanya.

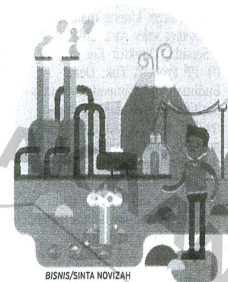
Dia mengatakan bahwa, yang terpenting bagi investor untuk mau berinvestasi di suatu negara adalah prospek geologi, kebijakan fiskal, dan kepastian hukum.

Menurut Ali, diperlukan adanya perbaikan fiskal dengan mengembalikan prinsip *assume and discharge*, karena investor memerlukan kepastian fiskal dalam pelaksanaan KKS.

Di samping itu, diperlukan konsolidasi biaya antar wilayah kerja karena dapat mendorong eksplorasi dan investasi secara masif.

Selain itu, investor hulu migas memerlukan adanya kepastian hukum atau kontrak seperti jaminan kontrak dan perjanjian internasional (*tax treaty*) yang akan dihormati.

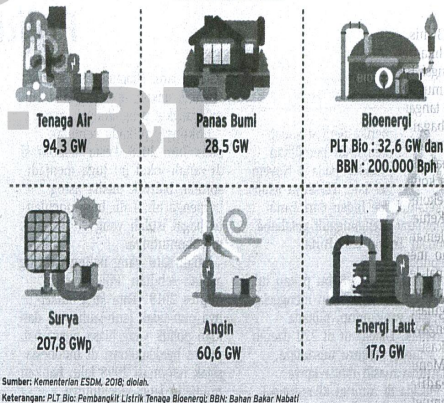
Kepastian tidak adanya krimi-



BISNIS/SINTA NOVIZAH

Energi Terbarukan Nasional

DPR menyiapkan rencana revisi UU tentang Minyak dan Gas sejalan dengan pembahasan rancangan undang-undang yang bakal mengatur pemanfaatan energi baru dan terbarukan.



nalisis seperti perselisihan terkait dengan kontrak diselesaikan dengan mekanisme kontrak (perdata) bukan pidana (kriminalisasi) juga sangat dibutuhkan para investor.

"Kapasitas dan otoritas merupakan kunci keberhasilan lembaga pengelola migas, tetapi perbaikan fiskal dan kepastian hukum merupakan pilar penting investasi migas." ■